



# LAKIP

**(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)**

# 2024

## BAPPEDA

**(BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH)**

# KOTA BAUBAU



Jalan Raya Palagimata, Betoambari,  
Baubau, Sulawesi Tenggara 93721



[bappeda@baubaukota.go.id](mailto:bappeda@baubaukota.go.id)



<https://bappeda.baubaukota.go.id>



[bappeda\\_baubau](https://www.instagram.com/bappeda_baubau)



[Bappeda Baubau](https://www.facebook.com/BappedaBaubau)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian Kinerja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Baubau, Februari 2024

Kepala Bappeda Kota Baubau,



**D. DAHRUL DAHLAN, S.STP., M.Si**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19780717 199612 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Kota Baubau .....	4
1.4. Isu-Isu Strategis .....	13
1.5. Sumber Daya Bappeda Kota Baubau .....	14
1.6. Sarana Prasarana Bappeda Kota Baubau .....	17
1.7. Keuangan .....	19
1.8. Sistematika Penyajian.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1. Rencana Strategis Bappeda Kota Baubau 2018-2023 .....	23
2.2. Rencana Kinarja Tahunan (RKT) Tahun 2023 .....	37
2.3. Perjanjian Kinerja 2023 .....	37
2.4. Program dan Kegiatan .....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	47
3.1. Metodologi Pengukuran Caoaian Kinerja .....	47
3.2. Capaian Kinerja Organisasi.....	51
3.3. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	68
3.4. Realisasi Anggaran .....	76
BAB IV PENUTUP .....	84

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappeda Kota Baubau menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LAKIP Bappeda Kota Baubau Tahun 2023 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kota Baubau bagi Wali Kota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2023.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Baubau No. 1 Tahun 2021, tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Baubau Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 36 Tahun 2023, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 serta Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau.

### **1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BAUBAU**

Menurut Peraturan Walikota Baubau No. 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, pada Pasal 2 ayat (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau menjalankan Fungsi :

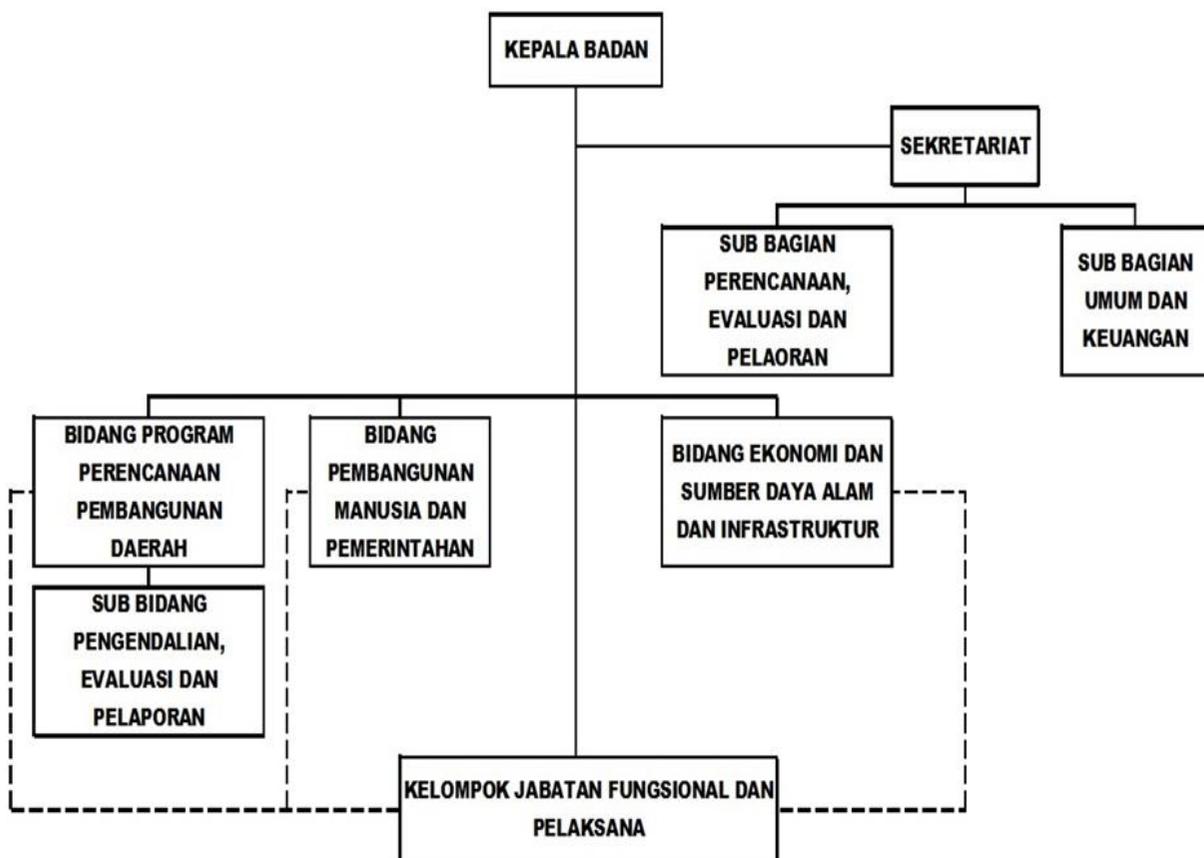
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
2. Penyiapan dan penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang akan menjadi pedoman penyusunan Renstra dan Renja OPD;
3. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Pengorganisasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
7. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pelaku pembangunan;
8. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;
9. Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Daerah;
10. Penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;

12. Menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
13. Pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan OPD;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok Bappeda tersebut, maka struktur organisasi Bappeda terdiri atas :

**Gambar 1.3.1**  
**Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau**

**Peraturan Walikota Baubau Nomor No. 36 Tahun 2023 Bagan Struktur Organisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tipe B**



Adapun uraian tugas dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Wali Kota Baubau No. 36 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Badan**

mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **Tugas :**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta melaksanakan perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan mengsinergikan perencanaan, mengendalikan pembangunan daerah, memimpin, membina dan pengkoordinasian pelayanan administrasi, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan;

#### **Fungsi :**

- a. Perumusan Kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

#### **Tugas :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan.

**Fungsi :**

- a. Pengoordinasian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Penggordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Badan;
- g. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara;
- h. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
- i. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Badan, serta kearsipan dan dokumentasi;
- j. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :**

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;  
Tugas :

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan, penyusunan program dan kegiatan bantuan dalam dan luar negeri, pengkoordinasian kegiatan perencanaan, serta pelaporan pelaksanaan program dilingkup Badan;

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tugas :

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, penataan organisasi dan tata laksana, pengadaan dan layanan internal, pengelolaan kepegawaian, pengembangan sistem kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian, melaksanakan pelayanan keuangan, penyiapan penatausahaan perbendaharaan dan penyiapan pelaporan keuangan Badan.

### **3. Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Tugas :**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang analisis data dan informasi pembangunan, perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

**Fungsi :**

- a. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. Pengelolaan analisa hasil evaluasi untuk pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Sub Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator dalam hal ini Kepala Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Tugas :

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan kebijakan, koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.

#### **4. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan**

Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### **Tugas :**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

##### **Fungsi :**

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ lembaga di provinsi dan kab/kota dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dan Infrastruktur**

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

**Tugas :**

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

**Fungsi :**

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga di provinsi dan kab/kota dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Kelompok jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pejabat pemberi kinerja melalui pejabat administrator;

##### **Tugas :**

Tugas jabatan fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

#### **1.4 ISU-ISU STRATEGIS**

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Secara spesifik untuk mengoptimalkan peran Bappeda Kota Baubau dalam mencapai tujuan sasaran dalam RPJMD dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

**Tabel 1.4.1**  
**Rumusan Masalah dan Isu strategis**

No	Rumusan Masalah	Isu Strategis
1	Dampak dari adanya pandemic covid 19 banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan sehingga menimbulkan kemiskinan baru	Meningkatnya persentase kemiskinan dampak dari pandemic Covid-19
2	Permasalahan persampahan yang ada di Kota Baubau sehubungan dengan kondisi TPA yang kritis (overload) yang harus segera diatasi	Perlunya strategi pengelolaan dan Pengurangan persampahan di Kota Baubau secara terpadu
3	Jumlah balita gizi buruk dan stunting di Kota Baubau yang masih tinggi	Masih terdapat balita gizi buruk dan stunting.
4	Perencanaan kewilayan yang belum terintegrasi	Perlunya sebuah kajian untuk perencanaan kewilayahan yang terintegrasi

## 1.5 SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu.

Berdasarkan data terakhir per 31 Desember Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau secara keseluruhan memiliki jumlah pegawai sebanyak 57 orang, yang terdiri dari 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 orang pegawai Non PNS.

**Tabel 1.5.1**  
**Jumlah pegawai berdasarkan jabatan Struktural, Fungsional, Staff ASN dan Staf Non ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Per 31 Desember 2023**

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kasubag	2
5	Kasubid	1
6	Kelompok jabatan Fungsional Perencana	7
7	Staf ASN	25
8	Staf Non ASN	17
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>

Adapun kondisi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 36 orang dan perempuan sebanyak 22 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (S3) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.5.2**  
**Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Per 31 Desember 2023**

Jumlah (ASN + Non ASN}	Jenis Kelamin		Pendidikan						
	Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
<b>57</b>	35	22	1	-	9	2	35	9	1

**Tabel 1.5.3**  
**Presentase Pegawai Berdasar Jenis Kelamin dan Pendidikan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau**  
**Per 31 Desember 2023**



Kemudian dilihat dari rata-rata usia aparaturnya, rentang usia aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau cukup bervariasi dengan usia termuda 21 tahun dan tertua 58 tahun dengan jumlah pegawai terbanyak berada pada usia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 22 aparatur sebagaimana tampak pada tabel berikut :

**Tabel 1.5.4**  
**Data Pegawai Berdasar Usia Aparatur**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau**  
**Per 31 Desember 2023**

Jumlah Pegawai (ASN + Non ASN)	s/d 20	21 s/d 30	31 s/d 40	41 s/d 50	51 s/d 58
57	15	2	23	15	2

**Tabel 2.2.4**  
**Data Pegawai Berdasar Golongan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau**  
**Per 31 Desember 2023**

Jumlah Pegawai ASN	Golongan			
	I	II	III	IV
40	0	2	30	8

### 1.6 SARANA PRASARANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BAUBAU

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, diperlukan sarana prasarana yang cukup memadai. Sarana Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Bangunan Gedung untuk ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Aset-aset yang dimiliki kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau sampai saat ini masih dalam kondisi baik. Secara rinci, sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Baubau dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1.6.1**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**Bappeda Kota Baubau sampai dengan 31 Desember 2023**

No	Uraian	Aset		Kondisi
		Jumlah	Satuan	
1	Bangunan Gedung	1	Buah	Baik
2	Tempat Parkir	2	Buah	Baik
3	Sepeda Motor	23	Unit	Baik
4	Mobil	3	Unit	Baik

No	Uraian	Aset		Kondisi
		Jumlah	Satuan	
5	Ac Split	18	Unit	Baik
6	TV	6	Unit	Baik
7	Laptop	25	Unit	Baik
8	printer	32	Unit	Baik
9	Pc Unit	20	Unit	Baik
10	Scanner	6	Unit	Baik
11	Infocus/Slide Proyektor	10	Unit	Baik
12	Speaker Bluetooth	4	Unit	Baik
13	Speaker	4	Unit	Baik
14	Camera Digital	7	Unit	Baik
15	cctv	1	Set	Baik
16	Dispenser	2	Unit	Baik
17	Dispenser sensor soap	4	Unit	Baik
18	Filing Cabinet Kayu	3	Unit	Baik
19	Filing Cabinet Besi	6	Unit	Baik
20	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
21	Mic Conference	22	Unit	Baik
22	Lemari Kayu	21	Unit	Baik
23	Meja kerja pegawai non struktural	21	Unit	Baik
24	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
25	Meja Kerja Bersekat	3	Unit	Baik
26	Kursi Besi / Metal	10	Unit	Baik
27	Kursi kerja eselon III	1	Unit	Baik
28	Kursi Kerja pegawai Non Struktural	2	Unit	Baik
29	Kursi kerja Pejabat Eselon II	6	Unit	Baik
30	Kursi Rapat	5	Unit	Baik
31	Alat Pemadam/Portable	5	Unit	Baik
32	Meja Rapat	10	Unit	Baik
33	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit	Baik
34	Papan Nama Instansi	2	Unit	Baik
35	Papan Pengumuman	4	Unit	Baik
36	UPS	9	Unit	Baik
37	Mesin Penghisap Debu/Vacuum	1	Unit	Baik

No	Uraian	Aset		Kondisi
		Jumlah	Satuan	
	Cleaner			
38	Mobile File manual	1	Unit	Baik
39	Audio Mixing Portable	1	Unit	Baik
40	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Baik
41	Sound System	2	Unit	Baik
42	Alat Pemotong Rumput	1	Unit	Baik
43	Lemari Es	1	Unit	Baik
44	Stan Baliho	1	Unit	Baik
45	Tiang Bendera	7	Unit	Baik
46	Tangga Aluminium	3	Unit	Baik
47	Rotator	4	Unit	Baik
48	Monitor	1	Unit	Baik
49	Server	2	Unit	Baik
50	Meja Pimpong	1	Unit	Baik
51	Infocus Mini Potable	2	Unit	Baik
52	Pot Bunga	2	Unit	Baik
53	Podium	2	Unit	Baik
54	Bak Sampah	1	Unit	Baik
55	Gordyin/Kray	1	Set	Baik

## 1.7 KEUANGAN

A. Berdasarkan DPA Induk sebelum Perubahan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 memperoleh pagu sebesar Rp. 9.787.435.380,00- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah). Yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 8.838.229.130,00-

Terdiri dari :

a. Belanja Pegawai : Rp. 3.583.027.292,00-

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.255.201.838,00-

2. Belanja Modal Rp. 949.206.250,00-

terdiri dari :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : RP. 274.206.250,00
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 675.000.000,00-
- B. Berdasarkan DPPA (DPA Perubahan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 10.771.874.686,00-, (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 9.486.038.436,00-  
Terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai : Rp. 3.869.214.000,00-
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.616.824.436,00-
2. Belanja Modal Rp. 1.285.836.250,00-  
terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : RP. 310.836.250,00-
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 975.000.000,00-

Dari pagu anggaran sesudah perubahan tersebut **terealisasi** yaitu sebesar Rp. 10.367.244.373,00,- yaitu terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 9.093.637.873,00-  
Terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai : Rp. 3.544.797.084,00-
  - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.548.840.789,00-
2. Belanja Modal Rp. 1.273.606.500,00-  
terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : RP. 298.606.500,00-
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 975.000.000,00-

**Tabel 1.7.1**  
**Pagu Anggaran Perubahan dan Realisasi Per-Jenis Belanja**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kota Baubau Tahun 2023**

No	Jenis	Anggaran	Realisasi	%
1.	<b>Belanja Operasi :</b>	<b>9.486.038.436</b>	<b>9.093.637.873</b>	<b>95,86</b>
	a. <i>Belanja Pegawai</i>	3.869.214.000	3.544.797.084	91,62
	b. <i>Belanja Barang dan jasa</i>	5.616.824.436	5.548.840.789	98,79
2.	<b>Belanja Modal :</b>	<b>1.285.836.250</b>	<b>1.273.606.500</b>	<b>99,05</b>
	a. <i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	310.836.250	298.606.500	96,07
	b. <i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	975.000.000	975.000.000	100
	<b>Jumlah</b>	<b>10.771.874.686</b>	<b>10.367.244.373</b>	<b>96,24</b>

## 1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah ketidak berhasilan kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang

I.2 Dasar Hukum

I.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Baubau

I.4 Apek Strategis

I.5 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Baubau

I.6 Sarana Prasarana Dinas Bappeda Kota Baubau

I.7 Keuangan

I.8 Sistematika Penyajian

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

2.4 Program Dan Kegiatan

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Bappeda Kota Baubau

3.2 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2023

**BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BAUBAU 2018-2023**

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda diberikan kewenangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan Strategis Bappeda Kota Baubau tahun 2018-2023 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Baubau selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2018-2023, dengan rumusan visi jangka menengah, misi, tujuan, sasaran hingga arah kebijakan.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Baubau 2018-2023 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran perencanaan pembangunan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Di samping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

RPJM Daerah Kota Baubau merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dengan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan RPJP Daerah.

Adapun RPJM Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Visi pembangunan jangka menengah Kota Baubau Tahun 2018-2023 adalah **“Mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya Tahun 2018-2023”**. Visi tersebut mengandung tiga elemen utama pembangunan yaitu mewujudkan Kota Baubau yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya yang menekankan pada pemerataan pembangunan demi kesejahteraan melalui kemajuan pembangunan yang berbudaya.
2. Misi pembangunan jangka menengah Kota Baubau Tahun 2018-2023 yakni :
  - a. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Tertib;
  - b. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Aman;
  - c. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Maju;
  - d. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Populer;
  - e. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Indah;
  - f. Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Lancar.
3. Dalam konteks Perencanaan Pembangunan Daerah, urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diletakkan pada **misi ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Tertib”**. Dalam konteks ini, Kota Baubau dipandang sebagai sebuah wilayah yang Tertib dalam pengelolaan pemerintahan dan administrasi. tertib pengelolaan keuangan, tertib pelayanan publik, tertib tata pergaulan sosial kemasyarakatan dan tertib penegakkan hukum. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan

kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kota Baubau juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur. Hal ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Tujuan RPJM Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah meliputi :
  - a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
  - b. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang religius;
  - c. Meningkatkan pemerataan kualitas SDM;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
  - e. Meningkatkan daya saing daerah;
  - f. Mewujudkan Kota Baubau sebagai kota dagang, jasa dan transit yang berbudaya;
  - g. Meningkatkan pengelolaan kota yang rapi, indah dan ramah lingkungan;
  - h. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah.

### **2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **2.1.1.1. Tujuan**

Merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai 5 tahun ke depan. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2018 – 2023 adalah **“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan.”**

### 2.1.1.2. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut (2018–2023) adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan OPD.
2. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang).

**Tabel 2.1.1.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai**  
**Bappeda Kota Baubau Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	Persen	60	67	70	75	80
			Persentase sinergitas capaian perencanaan	Persen	80	85	90	95	100
			Persentase konsistensi perencanaan	Persen	85	87	92	96	100
2		Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase Rata-Rata hasil ketercapaian pelaksanaan program Pendukung OPD pendukung OPD	Persen	100	100	100	100	100

### 2.1.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 2.1.1.3.1.Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi yang sudah dirumuskan Bappeda Kota Baubau yaitu ***“Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui integrasi sistem informasi dalam Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan”***.

#### 2.1.1.3.2.Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Melaksanakan pendataan perencanaan pembangunan daerah.
2. Memperkuat sistem informasi data terpadu.
3. Meningkatkan validitas data sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang pemerintahan, sumber daya manusia dan kebudayaan, kesejahteraan

rakyat, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana.
6. Meningkatkan system koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah.
7. Meningkatkan pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD.

**Tabel 2.1.1.3.2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau**

Visi RPJMD	<b>MEWUJUDKAN BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA 2018-2023</b>			
Misi RPJMD	<b>Mewujudkan Baubau sebagai Kota Tertib</b>			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan.	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	1. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC. 2. Persentase sinergitas capaian perencanaan. 3. Persentase konsistensi perencanaan	Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui intergrasi sistem informasi dalam Singkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan	Melaksanakan pendataan perencanaan pembangunan daerah
				Memperkuat sistem informasi data terpadu
				Meningkatkan validitas data sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

				Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang pemerintahan, sumber daya manusia dan kebudayaan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
				Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana
				Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana.
	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD		Meningkatkan pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD

Cara mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah melalui perumusan strategi yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1.3.2.2**  
**Strategi, Program dan Kegiatan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau tahun 2023**

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Mendorong perencanaan	Program Perencanaan,	Penyusunan Perencanaan	Analisis Kondisi Daerah,

	pembangunan yang berkualitas melalui integrasi sistem informasi dalam Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan	Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	dan Pendanaan	Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
				Pelaksanaan Konsultasi Publik
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah

				Kabupaten/Kota
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2	Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui intergrasi sistem informasi dalam Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan

				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan

				Pembangunan Daerah Bidang SDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
3	Mendorong Peningkatan Pencapaian capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	penunjang)			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2023, target yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	1. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC.	%	80
		2. Persentase sinergitas capaian Perencanaan.	%	100
		3. Persentase konsistensi perencanaan	%	100
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD ( <i>sasaran penunjang</i> )	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	%	100

## 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Baubau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Kota Baubau**  
**Tahun Anggaran 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	80
		Persentase sinergitas capaian perencanaan	100
		Persentase konsistensi perencanaan	100
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100

**Tabel 2.3.2**  
**Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja BAPPEDA**  
**Kota Baubau Tahun Anggaran 2023**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>		<b>KET</b>
		<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SESUDAH PERUBAHAN</b>	
A	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.543.772.927	2.896.143.979	APBD
B	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.657.273.694	1.837.843.160	APBD
C	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.586.388.759	6.037.887.547	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>9.787.435.380</b>	<b>10.771.874.686</b>	<b>APBD</b>

## 2.4. Program dan Kegiatan

### 2.4.1. Program

Program Kerja Teknis Operasional merupakan alat untuk mencapai tujuan dan mewujudkan tujuan Bappeda Kota Baubau meliputi:

- a. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Program Teknis).
- b. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (Program Teknis).
- c. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Program penunjang).

### 2.4.2. Kegiatan

Untuk Kegiatan dan Target Kinerja Bappeda Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 Perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4.2.1**  
**Perbandingan Kegiatan dan Target Kinerja**  
**Bappeda Kota Baubau Tahun 2023 Induk dan 2023 Perubahan**

No	Program / Kegiatan	Target Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5
1	<b>Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.543.772.927</b>	<b>2.896.143.979</b>
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	1.576.230.168	1.775.079.900
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	302.110.024	447.781.624

3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	546.629.635	480.260.465
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	118.803.100	193.021.990
<b>II.</b>	<b>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.657.273.694</b>	<b>1.837.843.160</b>
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	732.069.658	628.510.520
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	560.204.180	542.775.180
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	364.999.856	666.557.460
<b>III.</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>5.586.388.759</b>	<b>6.037.887.547</b>
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	100%	104.215.893	104.215.893
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.642.847.972	3.931.834.680
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	11.021.750	17.421.830
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	90.000.000	50.050.000
5	Administrasi umum perangkat daerah	100%	813.202.294	1.031.284.294
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	274.206.250	310.836.250

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	210.313.800	221.663.800
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	440.580.800	370.580.800
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>	<b>9.787.435.380</b>	<b>10.771.874.686</b>

**Tabel 2.4.2.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Target Kinerja**  
**Bappeda Kota Baubau Tahun 2023 Perubahan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100 %</b>	<b>2.896.143.979</b>
<b>A</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>100%</b>	<b>1.775.079.900</b>
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	69.847.458
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	4 Dokumen	256.303.787
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	103.116.252
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	41 Berita Acara	32.434.400
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	202.049.505
6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.111.328.498
<b>B</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>447.781.624</b>
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	134.434.216
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	100 Orang	229.675.536
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	83.671.872

	<b>C</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>480.260.465</b>
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Laporan	104.788.684
	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	2 Kerja Sama	214.998.930
	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan	160.472.851
	<b>D</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>193.021.990</b>
	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	91.607.430
	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	55.800.990
	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.613.570
<b>II</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>100 %</b>	<b>1.837.843.160</b>
	<b>A</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>628.510.520</b>
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	37.573.740
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	38.300.000
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	21.757.300
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	47.116.330
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen	28.367.998

		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	54.701.510
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	14.700.310
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	385.993.332
	<b>B</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>100%</b>	<b>542.775.180</b>
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	9.962.310
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	27.397.920
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	9.404.830
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	164.220.000
	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	9.095.590
	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	23.380.150
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	20.859.160
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	278.455.220
	<b>C</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>666.557.460</b>
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	24.334.660

		Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	21.599.800
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	13.843.000
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	606.780.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT</b>		<b>100%</b>	<b>6.037.887.547</b>
	<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>104.215.893</b>
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	34.422.215
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.489.967
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	11.970.004
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	11.019.934
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10.967.467
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.177.182
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.169.124
	<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.931.834.680</b>
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Tahun	3.782.564.000
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	82.163.180
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	67.107.500
	<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>17.421.830</b>
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.021.750
	2	Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	6.400.080

		Daerah pada SKPD		
<b>D</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50.050.000</b>
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	50.050.000
<b>E</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.031.284.294</b>
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	14.338.500
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	50.034.294
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	31.393.500
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	38.200.000
5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	68.338.000
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	828.980.000
<b>F</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>310.836.250</b>
1		Pengadaan Mebel	8 Unit	68.677.500
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	242.158.750
<b>G</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>221.663.800</b>
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.201.800
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Laporan	145.112.000
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	36.350.000
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	33.000.000
<b>H</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>370.580.800</b>
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit	108.960.800
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 unit	20.600.000

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023*

	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	1 unit	241.020.000
<b>JUMLAH</b>				<b>10.771.874.686</b>

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Format Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kota Baubau 2023, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indicator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Baubau 2023.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra SKPD.

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2023 dengan menggunakan beberapa indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC
- b. Persentase sinergitas capaian perencanaan
- c. Persentase konsistensi perencanaan
- d. Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD

Dari indikator kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa Metodologi pengukuran capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota baubau sebagai berikut :

1. Untuk menghitung Presentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC yaitu berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Penetapan Nilai saki**  
**berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021**

NO	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTERPRESTASI
1	AA	> 90 - 100	<i>Sangat Memuaskan yaitu :</i> Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	<i>Memuaskan yaitu :</i> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	<i>Sangat Baik yaitu :</i> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3

			unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	> 60 - 70	<i>Baik yaitu :</i> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	<i>Cukup (Memadai) yaitu :</i> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	c	> 30 - 50	<i>Kurang yaitu :</i> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 - 30	<i>Sangat Kurang Yaitu :</i> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

2. Untuk menghitung Persentase sinergitas capaian perencanaan, Persentase konsistensi perencanaan, dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD yaitu dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut :
- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, presentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

<b>% Capaian</b>	<b>=</b>	<b>Realisasi</b>	<b>X 100 %</b>
		<b>Target</b>	

- b. jika realisasi tinggi menunjukkan pencapaian kinerja yang tidak baik atau rendah, presentase capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus :

<b>Persentase Pencapaian Target</b>	<b>=</b>	<b>(2 x Target)-Realisasi</b>	<b>X 100 %</b>
		<b>Target</b>	

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>	<b>Kode</b>
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Renda	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### **3.2 Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Adapun Target dan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Target dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis dan Pencapaian pelaksanaan**  
**program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA			PENJELASAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	80 %	100 %	100 %	Untuk capaian pada indikator Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC dari hasil penilaian inspektorat dengan mengambil sampel 24 OPD, dimana OPD dengan nilai SAKIP B berjumlah 19 OPD dan OPD dengan Nilai Sakip CC sebanyak 5 OPD. Sehingga indikator kinerja utama untuk Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC mencapai 100 %.
		Persentase sinergitas capaian perencanaan	100 %	84,87 %	84,87 %	dari 15 sasaran Strategis RPJMD dengan 20 indikator ada beberapa indikator yang tidak mencapai target, yaitu pada indikator 1. Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan & industri hanya mencapai 19,88 %, 2. Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya mencapai 32,63 %
		Persentase konsistensi perencanaan	100 %	93,04 %	93 %	Bappeda kota baubau tidak mencapai target pada indikator Persentase konsistensi Perencanaan dikarenakan setelah RPJMD perubahan ada perubahan regulasi pusat tentang pemutahiran program secara nasional. Perubahan regulasi ini terdiri dari : 1. Permendagri nomor 90 tahun 2019 Klasifikasi,

						<p>kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>
2	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100 %	100 %	100 %	<p>Pencapaian sasaran strategis yaitu Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang) dengan indikator sasaran rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD, dimana Bappeda Kota baubau memperoleh capaian 100 %. Hal di karenakan semua kegiatan rutin kesekretariatan Bappeda sebagai pendukung ketercapaian sasaran Renstra terlaksana semua.</p>

Berdasarkan tabel diatas Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau tahun 2023 terdapat capaian kinerja yang *realisasinya di atas 100%* yaitu pada indikator Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC, pencapaian target kinerja ini diperoleh karena adanya komitmen antara atasan dan bawahan pada Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau untuk melaksanakan perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati di awal tahun 2023 sebelumnya, selain itu juga Tersedianya regulasi sebagai pijakan pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini kegiatan dari proses perencanaan sampai pelaporan. Secara rinci meliputi :

1. Tersedianya indikator kinerja utama renstra;
2. Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)
3. Tersedianya pedoman penyusunan renstra unit kerja, penyusunan perjanjian kinerja, pedoman penilaian kinerja, dan pedoman penyusunan pelaporan Kinerja (SAKIP) Terlaksananya sosialisasi penyesuaian indikator kinerja utama renstra
4. Terlaksananya sosialisasi regulasi dan pedoman perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
5. Tersedianya pedoman sistem perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan Terintegrasi.

Selain pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) diatas, juga ada pengukuran kinerja berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan di masing-masing bidang yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.2.2**  
**Target dan Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BAUBAU	Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
			Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021);	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
			Peraturan Daerah Kota Baubau No. 1 Tahun 2021, tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Baubau Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

			Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau;	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 60 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Tahun	41 Orang/Tahun			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	4 Paket			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Paket	50 Paket			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Pengadaan Mebel	8 Unit	8 Unit			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Laporan	48 Laporan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

				<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	11 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	18 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
				<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan	4 Dokumen	4 Dokumen			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

				Lainnya					
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara			
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	41 Berita Acara	41 Berita Acara			
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen			
				<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	100 Orang	100 Orang			
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	1 Buku			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

				<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan			2 Laporan
				Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	2 Kerja Sama	2 Kerja Sama			
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan			
				<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

				Daerah					
				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	2 Laporan	2 Laporan			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

				Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan			
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

				Perangkat Daerah Bidang SDA					
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan			
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan			

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023*

				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan			
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--	--	--

### 3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota baubau tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan OPD

**Tabel 3.3.1**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan persasaran strategis**

No.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	Hasil penilaian SAKIP Inspektorat Kota Baubau terhadap OPD dengan nilai CC dibagi jumlah keseluruhan OPD dikali 100%;
		Persentase sinergitas capaian perencanaan Persentase konsistensi perencanaan	Jumlah sasaran RPJMD yang mencapai target dibagi seluruh sasaran dikali 100%;
		Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	Jumlah program RKPD yang terakomodir dalam DPA dengan jumlah keseluruhan program dalam RPJMD pada tahun n dikali 100%

2. Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran renstra OPD.

**Tabel 3.3.2**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi**  
**Perhitungan Program Pendukung Sasaran OPD**

No.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran renstra OPD	persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	Realisasi dibagi Target X 100 %

Adapun target dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2023 dapat di jelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.3.3**  
**Target dan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA			PENJELASAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	80 %	100 %	100 %	Untuk capaian pada indikator Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC dari hasil penilaian inspektorat dengan mengambil sampel 24 OPD, dimana OPD dengan nilai SAKIP B berjumlah 19 OPD dan OPD dengan Nilai Sakip CC sebanyak 5 OPD. Sehingga indikator kinerja utama untuk Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC mencapai 100 %.
		Persentase sinergitas capaian perencanaan	100 %	84,87 %	84,87 %	dari 15 sasaran Strategis RPJMD dengan 20 indikator ada beberapa indikator yang tidak mencapai target, yaitu pada indikator 1. Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan & industri hanya mencapai 19,88 %, 2. Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya mencapai 32,63 %
		Persentase konsistensi perencanaan	100 %	93,04 %	93 %	Bappeda kota baubau tidak mencapai target pada indikator Persentase konsistensi Perencanaan dikarenakan setelah RPJMD perubahan ada perubahan regulasi pusat tentang pemutahiran program secara nasional. Perubahan regulasi ini terdiri dari : 1. Permendagri nomor 90 tahun 2019 Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

						Pembangunan dan Keuangan Daerah 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>92,64 %</b>	
<b>JADI CAPAIAN KINERJA 92,64 % DENGAN KATEGORI KINEJA SANGAT BAIK</b>						

**Tabel 3.3.4**  
**Target dan Pencapaian pelaksanaan**  
**program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2023**

NO	SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA			PENJELASAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100 %	100 %	100 %	Pencapaian sasaran strategis yaitu Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang) dengan indikator sasaran rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD, dimana Bappeda Kota baubau memperoleh capaian 100 %. Hal di karenakan semua kegiatan rutin kesekretariatan Bappeda sebagai pendukung ketercapaian sasaran Renstra terlaksana semua.
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>100 %</b>	

Sedangkan perbandingan tingkat capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau dari Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan sampai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 Dan Tahun 2023, Badan Perencanaan Daerah Kota Baubau**

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	100%	100%	100%	116,13%	100%
2.	Persentase sinergitas capaian perencanaan	100%	100%	88,9%	91,58 %	84,87 %
3.	Persentase konsistensi perencanaan	105%	105%	109%	100%	93%
4.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	84%	95%	100%	100%	100%

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Tahun 2023 serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.6**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2023**  
**serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau**  
**Berdasarkan pencapaian pada sasaran strategis dan pencapaian sasaran pendukung OPD**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	80 %	100 %	100 %	pencapaian target kinerja ini diperoleh karena adanya komitmen antara atasan dan bawahan pada Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau untuk melaksanakan perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati, selain itu juga Tersedianya regulasi sebagai pijakan pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini kegiatan dari proses perencanaan sampai pelaporan. Secara rinci meliputi : 1. Adanya komitmen terhadap indikator kinerja utama renstra 2. Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 3. Tersedianya pedoman penyusunan renstra unit kerja, penyusunan perjanjian kinerja, pedoman penilaian kinerja, dan pedoman penyusunan pelaporan Kinerja (SAKIP) Terlaksananya sosialisasi penyesuaian indikator kinerja utama renstra	* target capaian sasaran RPJMD banyak yang tidak mencapai target. * Bappeda kota baubau tidak mencapai target pada indikator Persentase konsistensi Perencanaan dikarenakan setelah RPJMD perubahan ada perubahan regulasi pusat tentang pemutahiran program secara nasional. Perubahan regulasi ini terdiri dari : 1. Permendagri nomor 90 tahun 2019 Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan	1. Perlu meningkatkan upaya pendampingan pada OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 2. percepatan penyesuaian terhadap perubahan regulasi.
			Persentase sinergitas capaian perencanaan	100 %	84, 87	84, 87			
			Persentase konsistensi perencanaan	100 %	93,04 %	93 %			
		Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100%	100 %	100 %			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

							4. Terlaksananya sosialisasi regulasi dan pedoman perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 5. Tersedianya pedoman sistem perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan Terintegrasi.	3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
Rata-rata Capaian per indikator kineja							94,47 %		

**Tabel 3.3.7**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau**

Sasaran Strategis Daerah	Indikator Kinerja Utama Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	80 %	100 %	100 %	4.733.987.139	4.711.916.648	99,53 %	3,52 %
			Persentase sinergitas capaian perencanaan	100 %	84,87	84,87				
			Persentase konsistensi perencanaan	100 %	93,04 %	93 %				
		Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100 %	100 %	100%	6.037.887.547	5.655.327.725	93,66 %	
<b>Tingkat Capaian Kinerja</b>						<b>94,47 %</b>	<b>10.771.874.686</b>	<b>10.367.244.373</b>	<b>96,24 %</b>	
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian</b>									<b>96,48 %</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan ditunjukkan pada persentase capaian kinerja sebesar 94,47 % dengan pemanfaatan anggaran terkait program strategis sebesar 96,24 % dari yang telah ditetapkan, dan tingkat Efisiensi sebesar 3,52 %

### 3.4 Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran per sasaran strategis, per program, dan Realisasi Anggaran Pencapaian IKU & Program Penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2023 dapat dilihat pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Alokasi Per Sasaran Strategis dan per indikator Kinerja Tahun 2023**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota baubau**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Anggaran 2023	Realisasi 2023	% (Capaian)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	4.733.987.139	4.711.916.648	99,53 %
		Persentase sinergitas capaian perencanaan			
		Persentase konsistensi perencanaan			
2	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD	persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	6.037.887.547	5.655.327.725	93,66 %

**Tabel 3.4.2**  
**Alokasi Per Program Tahun 2023**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau**

No	Program	Anggaran	Realisasi	% (capaian)
1	2	3	4	5
1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.896.143.979	2.882.285.908	99,52 %
2	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.837.843.160	1.829.630.740	99,55 %
3	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.037.887.547	5.655.327.725	93,66 %

**Tabel 3.4.3**  
**Realisasi Anggaran Pencapaian IKU & Program Penunjang Tahun 2023**  
**Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau**

No	Sasaran Strategis OPD	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	<b>A</b> <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.896.143.979</b>	<b>2.882.285.908</b>	<b>99,52 %</b>	<b>APBD</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
		<b>I</b> <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.775.079.900</b>	<b>1.768.459.948</b>	<b>99,63</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
		1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	69.847.458	69.631.600	99,69	APBD	IKU
		2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	256.303.787	253.281.900	98,82	APBD	IKU
		3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	103.116.252	102.287.400	99,20	APBD	IKU
		4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	32.434.400	32.432.000	99,99	APBD	IKU
		5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	202.049.505	201.076.780	99,52	APBD	IKU
		6 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.111.328.498	1.109.750.268	99,86	APBD	IKU
		<b>II</b> <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>447.781.624</b>	<b>447.073.000</b>	<b>99,84</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

		1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	134.434.216	133.898.400	99,60	APBD	IKU
		2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	229.675.536	229.512.600	99,93	APBD	IKU
		3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	83.671.872	83.662.000	99,99	APBD	IKU
		<b>III</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>480.260.465</b>	<b>475.570.250</b>	<b>99,02</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
		1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	104.788.684	103.137.500	98,42	APBD	IKU
		2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	214.998.930	212.824.250	98,99	APBD	IKU
		3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	160.472.851	159.608.500	99,46	APBD	IKU
		<b>IV</b>	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>193.021.990</b>	<b>191.182.710</b>	<b>99,05</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
		1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	91.607.430	90.110.210	98,37	APBD	IKU
		2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	55.800.990	55.778.000	99,96	APBD	IKU
		3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	45.613.570	45.294.500	99,30	APBD	IKU

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

		<b>B</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.837.843.160</b>	<b>1.829.630.740</b>	<b>99,55 %</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
		<b>I</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>628.510.520</b>	<b>624.209.280</b>	<b>99,32</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.573.740	37.531.000	99,89	APBD	IKU
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	38.300.000	38.145.000	99,60	APBD	IKU
		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21.757.300	21.626.000	99,40	APBD	IKU
		4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	47.116.330	46.860.000	99,46	APBD	IKU
		5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.367.998	28.334.000	99,88	APBD	IKU
		6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	54.701.510	54.646.000	99,90	APBD	IKU
		7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.700.310	14.548.000	98,96	APBD	IKU
		8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	385.993.332	382.519.280	99,10	APBD	IKU

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

			Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
		<b>II</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>542.775.180</b>	<b>540.181.860</b>	<b>99,52</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.962.310	9.851.200	98,88	APBD	IKU
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	27.397.920	26.908.860	98,21	APBD	IKU
		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.404.830	9.331.400	99,22	APBD	IKU
		4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	164.220.000	164.042.400	99,89	APBD	IKU
		5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.095.590	8.900.500	97,86	APBD	IKU
		6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	23.380.150	23.052.500	98,60	APBD	IKU
		7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.859.160	20.561.500	98,57	APBD	IKU
		8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	278.455.220	277.533.500	99,67	APBD	IKU

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

			Pembangunan Daerah Bidang SDA					
		<b>III</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>666.557.460</b>	<b>665.239.600</b>	<b>99,80</b>	<b>APBD</b>	<b>IKU</b>
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.334.660	24.282.000	99,78	APBD	IKU
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	21.599.800	21.428.200	99,21	APBD	IKU
		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.843.000	13.725.000	99,15	APBD	IKU
		4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	606.780.000	605.804.400	99,84	APBD	IKU
<b>2</b>	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD.		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.037.887.547</b>	<b>5.655.327.725</b>	<b>93,66 %</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
		<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>104.215.893</b>	<b>103.509.400</b>	<b>99,32</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.422.215	33.912.400	98,52	APBD	NON IKU
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.489.967	10.473.000	99,84	APBD	NON IKU
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.970.004	11.922.000	99,60	APBD	NON IKU

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.019.934	11.010.000	99,91	APBD	NON IKU
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.967.467	10.924.000	99,60	APBD	NON IKU
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.177.182	10.119.000	99,43	APBD	NON IKU
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.169.124	15.149.000	99,87		
	<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.931.834.680</b>	<b>3.607.062.084</b>	<b>91,74</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.782.564.000	3.460.447.084	91,48	APBD	NON IKU
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.163.180	79.814.000	97,14	APBD	NON IKU
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	67.107.500	66.801.000	99,54	APBD	NON IKU
	<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>17.421.830</b>	<b>17.149.500</b>	<b>98,44</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11.021.750	10.945.500	99,31	APBD	NON IKU
	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.400.080	6.204.000	96,94		
	<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.050.000</b>	<b>49.922.250</b>	<b>99,74</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.050.000	49.922.250	99,74	APBD	NON IKU
	<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.031.284.294</b>	<b>1.025.280.404</b>	<b>99,42</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.338.500	14.175.000	98,86	APBD	NON IKU
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.034.294	49.744.400	99,42	APBD	NON IKU
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.393.500	31.345.000	99,85	APBD	NON IKU
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.200.000	35.740.000	93,56	APBD	NON IKU

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) TAHUN 2023

	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.338.000	67.132.000	98,24	APBD	NON IKU
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	828.980.000	827.144.004	99,78	APBD	NON IKU
	<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>310.836.250</b>	<b>298.606.500</b>	<b>96,07</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
	1	Pengadaan Mebel	68.677.500	68.209.500	99,32	APBD	NON IKU
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	242.158.750	230.397.000	95,14	APBD	NON IKU
	<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>221.663.800</b>	<b>211.221.087</b>	<b>95,29</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.201.800	7.172.000	99,59	APBD	NON IKU
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.112.000	137.949.087	95,06	APBD	NON IKU
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.350.000	33.850.000	93,12	APBD	NON IKU
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.000.000	32.250.000	97,73	APBD	NON IKU
	<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>370.580.800</b>	<b>342.576.500</b>	<b>92,44</b>	<b>APBD</b>	<b>NON IKU</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.960.800	81.701.800	74,98	APBD	NON IKU
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.600.000	20.315.000	98,62	APBD	NON IKU
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.020.000	240.559.700	99,81	APBD	NON IKU

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Baubau Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kinerja Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Baubau Tahun 2023.

Pengukuran kinerja Bappeda Kota Baubau Tahun 2023, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan **kualitas capaian keluaran (output)** atau **hasil (outcome)** dari kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023, Capaian rata-rata kinerja sasaran Bappeda Kota Baubau Tahun 2023 berdasarkan indikator/ parameter yang ditetapkan telah terealisasi.

Secara umum capaian kinerja di tahun 2023 pada Bappeda Kota Baubau telah mencapai peringkat yang dapat dikategorikan Sangat Baik, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian pada sasaran strategis sebesar 92,64 % terhadap target yang ditetapkan. Hal tersebut sangat ditunjang dengan komitmen pimpinan, serta upaya yang maksimal dari seluruh komponen di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau dan tidak terlepas dari komitmen seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Baubau untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dan tindak lanjut terhadap perencanaan serta upaya untuk lebih meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf dan masyarakat luas yang membutuhkannya. LAKIP ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau.

Baubau, Februari 2024

**KEPALA BAPPEDA KOTA BAUBAU,**



**Dr. DAHRUL DAHLAN, S.STP., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780717 199612 1 002